



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. MIRDAYANTI, SH., M.Si**

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan Biro Pemerintahan  
Setda Prov. Kep. Bangka Belitung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **M. HARIS AR., AP. MH**

Jabatan : Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. Kep. Bangka Belitung  
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Oktober 2018

Pihak Kedua,  
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG

Pihak Pertama,  
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI  
KEWILAYAHAN BIRO PEMERINTAHAN  
SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG

M. HARIS AR., AP. MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760620 199502 1 001

Dr. MIRDAYANTI, SH., M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681220 199003 2 003

**PERJANJIAN KINERJA  
BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pelaksanaan koordinasi administrasi wilayah	1. Jumlah tanah milik pemerintah provinsi yang telah bersertifikat. 2. Jumlah batas daerah antar kabupaten/kota yang terselesaikan 3. Jumlah unsur rupabumi (unsur buatan) yang terinventarisasi 4. Jumlah pilar batas daerah yang telah diinventarisasi dan dipelihara 5. Jumlah pilar batas daerah antar kabupaten/kota yang terpasang 6. Jumlah lahan yang telah disediakan oleh pemerintah provinsi	

Keterangan :

Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Kegiatan pensertifikatan tanah milik pemerintah provinsi kepulauan Bangka belitung                              | : Rp. 108.400.000,00 |
| 2. Kegiatan pembinaan penyelesaian batas daerah antar kabupaten/kota provinsi kepulauan Bangka belitung            | : Rp. 39.213.700,00  |
| 3. Kegiatan inventarisasi pendataan, penamaan, dan pembakuan unsur rupabumi (unsur buatan)                         | : Rp. 100.341.100,00 |
| 4. Kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah  | : Rp. 37.587.175,00  |
| 5. Kegiatan perapatan dan pemasangan pilar batas daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | : Rp. 59.554.940,00  |
| 6. Kegiatan pengadaan lahan  | : Rp. 339.940.000,00 |
| Jumlah Anggaran Keseluruhan  | : Rp. 625.821.975,00 |

Pangkalpinang, Oktober 2018

Pihak Kedua,  
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

Pihak Pertama,  
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI  
KEWILAYAHAN BIRO PEMERINTAHAN  
SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

M. HARIS AR., AP. MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760620 199502 1 001



Dr. MIRDAYANTI, SH., M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681220 199003 2 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERWANTO, SH**

Jabatan : Kepala Bagian Pengembangan Otonomi Daerah Biro  
Pemerintahan Setda Prov. Kep. Bangka Belitung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **M. HARIS AR., AP. MH**

Jabatan : Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. Kep. Bangka Belitung  
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Oktober 2018

Pihak Kedua,  
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG

Pihak Pertama,  
KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN  
OTONOMI DAERAH BIRO PEMERINTAHAN  
SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG

M. HARIS AR., AP. MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760620 199502 1 001

ERWANTO, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681220 199003 2 003

**PERJANJIAN KINERJA  
BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya jumlah koordinasi berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah	1. Jumlah LKPJ yang tersusun 2. Jumlah LPPD yang tersusun 3. Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dilakukan evaluasi kinerjanya 4. Jumlah urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah diselenggarakan 5. Jumlah NSPK yang telah diterapkan 6. Jumlah peserta yang mengikuti workshop 7. Jumlah izin keluar negeri yang diterbitkan untuk KDH dan WKDH serta ketua dan anggota DPRD 8. Jumlah KDH dan WKDH yang diangkat dan diberhentikan	

Keterangan :

Program Pengembangan Otonomi Daerah

1. Kegiatan koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban	: Rp. 145.384.945,00
2. Kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKKPD) kabupaten/kota di provinsi kepulauan Bangka belitung	: Rp. 276.971.408,00
3. Kegiatan penyusunan laporan pemerintah daerah	: Rp. 372.078.800,00
4. Kegiatan desk pilkada di provinsi kepulauan Bangka Belitung	: Rp. 143.257.000,00
5. Kegiatan peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan KDH dan WKDH	: Rp. 116.415.704,00
6. Kegiatan pelayanan perizinan kepala daerah/wakil kepala daerah serta ketua/anggota DPRD prov. Kep. Bangka Belitung ke luar negeri	: Rp. 74.753.565,00
7. Kegiatan sinkronisasi penyelenggaraan urusan/kewenangan di provinsi kepulauan Bangka Belitung	: Rp. 116.015.704,00
8. Kegiatan rapat koordinasi penerapan pelaksanaan NSPK di prov. Kep. Bangka Belitung	: Rp. 116.015.704,00
9. Kegiatan workshop penataan dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah di provinsi kepulauan Bangka belitung	: Rp. 102.310.000,00
Jumlah Anggaran Keseluruhan	: Rp. 1.448.352.830,00

Pangkalpinang, Oktober 2018

Pihak Kedua,  
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG

Pihak Pertama,  
KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN  
OTONOMI DAERAH BIRO PEMERINTAHAN  
SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG

M. HARIS AR., AP. MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760620 199502 1 001

ERWANTO, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681220 199003 2 003





## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MAYA CYNTHIA T.L, S.IP., MH**  
Jabatan : Kepala Bagian Pengembangan Kerjasama Biro Pemerintahan  
Setda Prov. Kep. Bangka Belitung  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **M. HARIS AR., AP. MH**  
Jabatan : Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. Kep. Bangka Belitung  
Selaku atasan langsung pihak pertama  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Oktober 2018

Pihak Kedua,  
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
SETDA PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG

M. HARIS AR., AP. MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760620 199502 1 001

Pihak Pertama,  
KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN  
KERJASAMA BIRO PEMERINTAHAN  
SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG

MAYA CYNTHIA T.L, S.IP., MH  
Pembina  
NIP. 19780324 200212 2 005

**PERJANJIAN KINERJA  
BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya jumlah pelaksanaan kerjasama daerah yang dikembangkan.	1. Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana 2. Jumlah kontribusi iuran yang diserahkan 3. Jumlah kontribusi iuran yang diserahkan dan rapat kerja yang diikuti 4. Jumlah kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang terlaksana 5. Jumlah potensi kerjasama yang sudah terdata 6. Persentase program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terlaksana	

Keterangan :

Program Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah

1. Kegiatan rapat koordinasi gubernur dengan bupati/walikota se-provinsi kepulauan Bangka belitung	: Rp. 108.249.000,00
2. Kegiatan partisipasi kontribusi iuran dan keikutsertaan dalam rakor/rakernas APPSI	: Rp. 101.320.000,00
3. Kegiatan partisipasi kontribusi iuran dan keikutsertaan dalam rapat kerja BKS provinsi kepulauan	: Rp. 0
4. Kegiatan pengembangan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	: Rp. 197.400.000,00
5. Kegiatan inventarisasi potensi kerjasama	: Rp. 93.150.000,00
6. Kegiatan penyelarasan program pemerintah daerah dan pusat	: Rp. 888.700.000,00
Jumlah Anggaran Keseluruhan	: Rp.1.388.819.000,00

Pangkalpinang, Oktober 2018

Pihak Kedua,  
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
SETDA PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG

Pihak Pertama,  
KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN  
KERJASAMA BIRO PEMERINTAHAN  
SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG

M. HARIS AR., AP. MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760620 199502 1 001

MAYA CYNTHIA T.L, S.IP., MH  
Pembina  
NIP. 19780324 200212 2 005